



LAPORAN KINERJA BBRSEKP 2025

**MENGOKOHKAN KINERJA, MEWUJUDKAN
TATA KELOLA YANG BAIK**



**Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Badan Penyelidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
2025**



LAPORAN KINERJA BBRSEKP 2025

**MENGOKOHKAN KINERJA, MEWUJUDKAN
TATA KELOLA YANG BAIK**



Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
2025



Tim Penyusun

Pembina

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan

(Dr. Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si)

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monitoring Evaluasi

(Fenni Eddrisea, M.Si)

Anggota

Nurma Yunita D

Edwin Yulia Setyawan

Retno Erlina Rahmawati

Dedi Prayitno

Rizky Hendriansyah

Kontributor

Sub Bagian Umum

Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur

Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan

Ketua Tim Kerja Kehumasan, Data dan Informasi

Ketua Tim Kerja Analisis Sosial Ekonomi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-NYA sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BBRSEKP selama periode tahun 2025, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

BBRSEKP tahun 2025 mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian selama periode tahun 2025 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBRSEKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Kinerja BBRSEKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja (IK) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP tahun 2025 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pelaksanaan tugas serta bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai BBRSEKP dalam meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi semua pihak yang mendukung pencapaian kinerja BBRSEKP selama tahun 2025. Semoga laporan kinerja ini juga memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Jakarta, 20 Januari 2026

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dr. Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja yang berlaku. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disusun dan disajikan secara akurat, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan keraguan atas keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dimaksud.

Tim Reviewer

1. Dewi Rukmasari

Jakarta, 22 Maret 2026
Perwakilan Satker Yang di Reviu
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP

1. Fenni Eddrisea

2. Nurma Yunita

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja BBRSEKP sepanjang tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi atas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama, mengelola keuangan, dan implementasikan SAKIP di lingkungan BBRSEKP pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, BBRSEKP telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai pada akhir tahun dengan dukungan anggaran Rp.8.081.921.000 guna mencapai target - target yang telah ditetapkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK). Hasil pengukuran kinerja dari aplikasi kinerjaku.kkp.go.id diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP pada tahun 2025 sebesar **116,34 %** sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 1. Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRSEKP Tahun 2025



Selama tahun 2025 dari 9 IK BBRSEKP, terdapat 6 IK berstatus istimewa (biru), dan terdapat 3 IK berstatus baik (hijau). Rincian target dan realisasi 9 IK tersebut adalah:

1. Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) dengan target sebesar 1 paket dan capaian sebesar 2 paket atau sama dengan 120%;

2. Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) dengan target indeks sebesar 76 dan capaian sebesar 93,80 atau sama dengan 120%;
3. Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) dengan target nilai sebesar 85 dan capaian sebesar 95,40 atau sama dengan 112,24%;
4. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai) dengan target nilai sebesar 92 dan capaian sebesar 99,35 atau sama dengan 107,99%;
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) dengan target nilai sebesar 71,5 dan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%;
6. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) dengan target nilai sebesar 82 dan capaian sebesar 84 atau sama dengan 102,44%;
7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 85% dan capaian sebesar 85% atau sama dengan 100%;
8. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) dengan target sebesar 80% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;
9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%) dengan target sebesar 80% dan capaian sebesar 95% atau sama dengan 118,75%.

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja tahun 2025, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama tahun 2025 sebesar Rp8.003.145.816 relatif rendah dari pagu anggaran Rp8.081.921.000. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 99,03% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari dua SK tercapai melebihi target atau **“ISTIMEWA”**, yaitu dengan rincian SK “Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan” dengan persentase capaian 120,00% sedangkan SK “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan” dengan persentase capaian 112,68%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Penyesuaian Dokumen Kinerja Tahun Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2026 terdapat peningkatan alokasi anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan alokasi anggaran tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Oleh karena itu, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi hasil evaluasi kinerja agar target yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan menantang, serta selaras dengan alokasi anggaran dalam DIPA terbaru.

2. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik, kegiatan pemantauan atas capaian IK secara berkala perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan rincian target IK yang disusun serta untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK melalui evaluasi rencana aksi secara berkala.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari triwulan tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Tahun. 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Capaian tahun 2025	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	2	120%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	76	93,80	120%
		3	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85	95,40	112,24%
		4	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92	99,35	107,99%
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,5	100	120%
		6	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82	84	102,44%
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85	85	100%

		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80	100	120%
		9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80	95	118,75%

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii

Bab I Pendahuluan **1**

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Keragaan SDM	5
1.5. Potensi dan Permasalahan	6
1.6. Sistematika Laporan	8

Bab II Perencanaan Kinerja **12**

2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Rencana Kerja Tahunan	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Pengukuran Kinerja	17

Bab III Akuntabilitas Kinerja **18**

3.1. Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2025	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
3.3. Realisasi Keuangan	44
3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP	46

Bab IV Penutup **48**

4.1 Kesimpulan	48
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	50

Lampiran

- Perjanjian Kinerja
- Penghargaan BBRSEKP

Daftar Tabel

1	Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Tahun. 2025	Viii
2	Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2025	14
3	Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2025	16
4	Capaian Kerja BBRSEKP Tahun 2025	19
5	Capaian IK Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	20
6	Perbandingan capaian IK 1 dengan satker PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – BRIN	21
7	Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN	23
8	Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN	24
9	Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN	24
10	Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN	24
11	Capaian IK Indeks profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	24
12	Perbandingan Capaian IK 2 dengan K/L Pusat kebijakan Upaya Kesehatan, BPKK Kemenkes	25
13	Capaian IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	27
14	Perbandingan Capaian IK 3 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	28
15	Capaian IK Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	30
16	Perbandingan Capaian IKPA dengan Kanwil Kemenkumham Bali	31
17	Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	32
18	Perbandingan Capaian IK 5 dengan satker Pusat Diklat SDM KLHK	33
19	Capaian IK Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	35
20	Perbandingan Capaian IK 6 dengan satker Pusat Diklat SDM KLHK	35
21	Capaian IK 7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	37
22	Perbandingan Capaian IK 7 K/L BBRSEKP Dengan Balitbangdiklat, Kemenag	38
23	Capaian IK 8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	40
24	Perbandingan Capaian IK 9 K/L BBRSEKP Dengan BBP2BKP	41
25	Capaian IK 9 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	42
26	Perbandingan Capaian IK 9 K/L BBRSEKP Dengan BBP2BKP	43
27	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2025	44
28	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025	44
29	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Tahun 2025	45
30	Capaian Efisiensi Anggaran BBRSEKP Tahun 2025	48
31	Rincian Target Dan Realisasi Atas 9 IK Tahun 2025	49

Daftar Gambar

1	Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2025	V
2	Struktur Organisasi BBRSEKP	4
3	Rincian ASN BBRSEKP	5
4	Komposisi Pegawai BBRSEKP	5
5	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2025-2029	13
6	Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2025	13
7	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1	23
8	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2	27
9	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3	29
10	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4	32
11	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5	34
12	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6	37
13	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7	39
14	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8	41
15	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9	43
16	Capaian Kinerja pada <i>Dashboard</i> Kinerja BBRSEKP Tahun 2025	48





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Tugas Dan Fungsi

1.4 Keragaan SDM

1.5 Potensi Dan Permasalahan

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BPPSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan hal diatas, maka kewajiban tersebut dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan disebutkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Bentuk implementasi tugas dan fungsi BBRSEKP melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan didukung operasional kegiatan manajerial serta sarana dan prasarana. Ketiga Kegiatan tersebut menjadi komponen rencana kegiatan satker yang memiliki target output atau keluaran pada setiap tahunnya. Output yang dihasilkan merupakan indikator keberhasilan dari BBRSEKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BBRSEKP telah menetapkan rencana kerja tahun 2025, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj BBRSEKP Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban BBRSEKP.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TA. 2025, berupa output dukungan manajemen satker. Target output tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BBRSEKP dan secara detail tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP dengan alokasi anggaran Rp8.081.921.000,- dengan DIPA Petikan Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (403836) Nomor : SP DIPA - 032.12.2.403836/2025 tanggal 25 November 2025 dengan kode digital stamp DS:5269-8867-2907-4310 (Revisi 08).

Gambaran akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 serta keluaran atau output apa saja yang telah dihasilkan BBRSEKP dituangkan dalam laporan kinerja ini. Meskipun laporan kinerja tahun 2025 lebih banyak menginformasikan kegiatan manajerial, berkenaan dengan masih belum ditetapkannya organisasi baru pasca tugas riset yang disatukan kedalam BRIN, namun tetap disusun sesuai kaidah aturan yang berlaku untuk dapat diketahui dan menjadi informasi bagi stakeholder terkait dan masyarakat luas.

Adapun dasar hukum penyusunan LKJ BBRSEKP tahun 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024,;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
3. Sebagai umpan balik (*Feed back*) untuk perbaikan kinerja triwulan di tahun berikut

1.3 Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas ***melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.***

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sebagai unit kerja di lingkungan BPPSDMKP, memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis riset di bidang kelautan dan perikanan. BBRSEKP berfungsi sebagai penyedia rekomendasi kebijakan (policy recommendation) yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy) melalui pelaksanaan riset sosial ekonomi yang komprehensif, integratif, dan aplikatif.

Dalam mendukung BPPSDM, BBRSEKP berkontribusi pada penguatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui penyediaan hasil kajian dan analisis yang menjadi dasar pengembangan program pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan.

Terhadap KKP secara lebih luas, BBRSEKP berperan dalam:

1. Mendukung penguatan struktur ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui analisis daya saing, tata niaga, investasi, dan kebijakan ekonomi sektor.
2. Mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui kajian sosial ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat pesisir, tata kelola sumber daya, dan instrumen kebijakan berbasis keberlanjutan.
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan melalui penyusunan analisis dampak kebijakan, evaluasi program, serta rekomendasi strategis dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

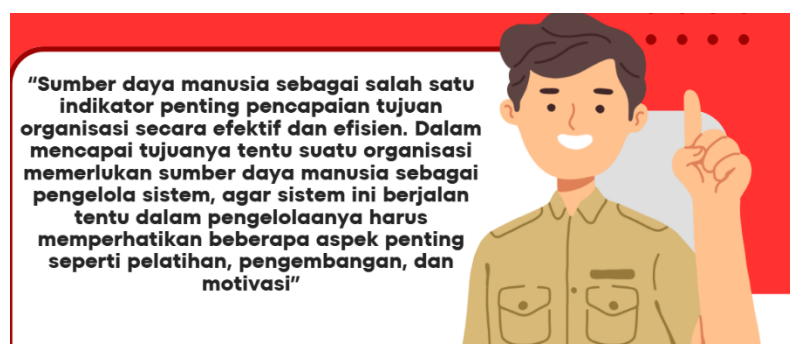
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.



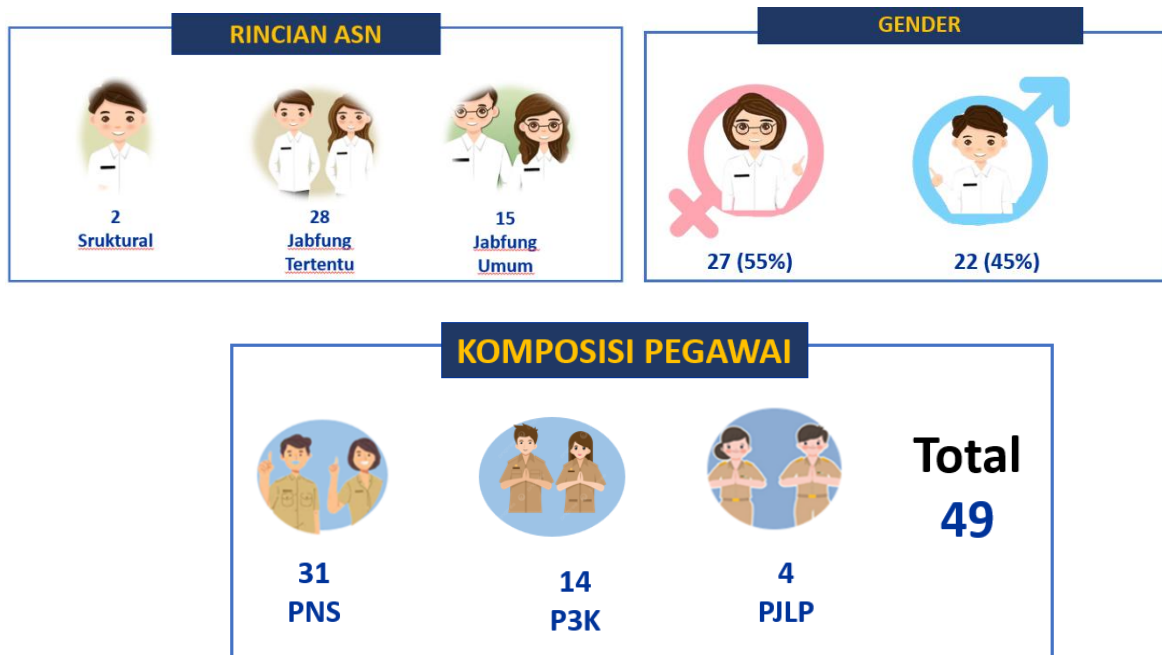
Gambar 2 . Struktur Organisasi BBRSEKP

1.4 Keragaan SDM



Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2025 berjumlah 49 orang, terbagi dalam 3 (tiga) yaitu SDM Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, P3K, serta Tenaga PJLP. Pada tahun 2025, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan

berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Komposisi dari pegawai yang berada di BBRSEKP, sebagai berikut :



Gambar 3 . Rincian ASN BBRSEKP

1.5 Potensi Dan Permasalahan

1) Potensi

Potensi BBRSEKP yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan melalui Kelembagaan Riset.

Kelembagaan BBRSEKP dibentuk untuk mendukung capaian agenda pembangunan nasional, pengarusutamaan pembangunan KKP, dan arah riset BPPSDM KP. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBRSEKP memiliki struktur organisasi dalam rangka mewujudkan efektifitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BBRSEKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Adapun BBRSEKP menyelenggarakan fungsi:

- perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan riset di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan ini dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dampaknya pada tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2025 adalah program dan kegiatan terkait riset sudah tidak dapat dilaksanakan.

Program riset pada BBRSEKP bertransformasi menjadi kegiatan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang ditanggungjawab oleh Tim Kerja Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi (Ansos), yang mana hal ini merupakan eksistensi dari perubahan organisasi yang sangat dinamis. Kegiatan yang dilakukan secara fungsi masih berupa kegiatan yang mendukung program kegiatan di lingkup eselon I kementerian, merupakan kegiatan menganalisa suatu topik atau rencana program dan memberikan rekomendasinya. Tim kerja ini melakukan kegiatan yang mendukung seluruh program BPPSDMKP dan program prioritas KKP.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya SDM yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan suatu kinerja yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten khususnya dapat dilakukan melalui pembinaan karir dengan perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi (diklat, seminar, *workshop*) yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan

memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Sampai dengan tahun 2025, meski jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan di bawah S1 relatif kecil, yaitu sejumlah 2 orang (5,71%), namun kontribusi pegawai dimaksud dibutuhkan untuk menjalankan fungsi BBRSEKP dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kemudian jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S3 mempunyai tren yang menurun dari tahun 2021 hingga awal tahun 2025, karena adanya mutasi pegawai BBRSEKP ke Badan Riset Nasional sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021 maupun ke eselon I lainnya. Secara keseluruhan, jumlah pegawai BBRSEKP pada tahun akhir 2025 berkurang sebesar 0,13% dibandingkan pada akhir tahun 2024.

Terlepas dari kebijakan organisasi riset yang sedang dialami saat ini, BBRSEKP masih menghadapi beberapa tantangan untuk melaksanakan kegiatan organisasi kedepan, antara lain:

1. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM fungsional perencana, pranata komputer, statistisi untuk meningkatkan keahlian terkait data analisis, programmer, desain grafis, *full-stack developer*, dll;
2. Kondisi dan ketersediaan alat pengolah data yang sudah tidak up to date dan sesuai dengan kebutuhan terkini;
3. Jumlah ruangan pertemuan yang masih terbatas, kondisi saat ini ketersediaan ruang pertemuan digunakan bersama oleh beberapa satuan kerja yang masing-masing mempunyai frekuensi pertemuan yang tinggi.

2) Permasalahan

- SOTK BBRSEKP belum mengalami reorganisasi sejak terbentuknya BRIN berdasarkan Perpres BRIN Nomor No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mentransfer semua tugas dan fungsi riset dari Kementerian / Lembaga ke BRIN sehingga kegiatan riset menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak Triwulan 3 Tahun 2022 sampai dengan saat ini selama organisasi baru belum terbentuk;
- Saat ini nomenklatur (nama) BBRSEKP juga masih menyandang nama 'riset';
- Hal ini menyebabkan tugas dan fungsi teknis BBRSEKP belum bisa dirumuskan dan dilaksanakan karena sudah tidak mempunyai tugas riset, namun belum terdefinisi dengan jelas tugas yang baru.
- Dampak lain dari hal ini adalah belum terakomodasinya peta jabatan pegawai secara optimal, karena beberapa pegawai telah melakukan uji kompetensi dalam jabatannya

masing-masing dan juga ada pegawai yang telah selesai tugas belajar, namun ini semua belum bisa diangkat dalam jabfung barunya karena belum adanya peta jabatan yang baru. Dan peta jabatan yang baru bisa disusun jika tusi organisasnya sudah jelas.

- Di sisi lain BBRSEKP sejak masa menjadi unit litbang hingga kini terus mendapatkan tugas untuk membantu program-program prioritas di KKP yang sifatnya adalah lintas eselon 1, yang saat ini utamanya adalah Program Kampung Nelayan Merah Putih. Untuk tugas-tugas ini BBRSEK telah melaksanakan tugas-tugas tersebut secara optimal.
- Saat ini terdapat inisiasi untuk reorganisasi dimana BBRSEKP tidak lagi menjadi bagian dari BPPSDM, karena terdapat kesulitan secara regulasi SOTK BPPSDM yang berfokus pada penyuluhan dan pengembangan SDM. Inisiasi ini masih akan difinalkan lanjut dengan pembahasan antara BPPSDM, Biro SDMO dan BBRSEKP. Ditargetkan reorganisasi ini selesai dalam kurun waktu maksimal 6 bulan sejak November 2025.

Atas permasalahan tersebut BBRSEKP merekomendasikan agar pembahasan SOTK BBRSEKP dapat segera difinalkan sehingga tusi BBRSEKP ada kejelasan dan bisa tetap membantu KKP dalam melaksanakan program-program prioritas dengan para pegawai BBRSEKP terakomodasi peta jabatannya.

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) tahun 2025. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Cover Laporan**
2. **Kata Pengantar**, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BBRSEKP.
3. **Ringkasan Eksekutif**, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja .
4. **Bab I Pendahuluan**, berisi gambaran umum tentang organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan pegawai dan organisasi serta potensi dan permasalahan.

5. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja.

6. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telag ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu (dua tahun terakhir);
- c. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realiasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional jika ada;
- e. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
- f. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

7. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8. **Lampiran**

- a. Perjanjian Kinerja; dan
- b. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB 2

Perencanaan

Kinerja

2.1 Rancangan Indikator Dan Target Kinerja

2.2 Rencana Kerja Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Indikator Dan Target Kinerja

Rancangan Indikator Dan Target Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan (BBRSEKP) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat sasaran kegiatan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BBRSEKP, yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Indikator Dan Target Kinerja Badan Pelatihan Dan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan (BPPSMKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. BPPSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mewujudkan SDM yang kompeten.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BPPSDM mempunyai visi untuk mewujudkan SDM kompeten yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi

kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BPPSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2025 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”



Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai **Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan** adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsisten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengigkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.
2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplementasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

B. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi asta cita BPPSDM yang menjalankan misi asta cita Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

Asta Cita -2 yakni “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan asta cita pada ekonomi biru, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan

3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (*science based policy*);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
4. Menghasilkan *big data* sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM secara efektif dan efisien.

D. Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2025-2029

Sasaran Kegiatan merupakan kondisi yang akan dicapai dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. BPPSDMKP tahun 2025 – 2029 menetapkan lima sasaran program yang mengacu pada sasaran strategis KKP, yaitu:

- SP-1** Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- SP-2** Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat;
- SP-3** Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
- SP-4** Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP.

Sebagai unit kerja Eselon II, BBRSEKP melaksanakan kegiatan yang di *cascading* dari sasaran strategis (SP) BPPSDMKP menjadi sasaran kegiatan (SK) BBRSEKP yaitu **SP-2** dan **SP-4** diturunkan menjadi SK -1 dan SK-2 sebagai sasaran kegiatan yang harus dicapai yaitu:

- SK-1** Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- SK-3** Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Gambar 5. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Rancangan Indikator Dan Target Kinerja 2025-2029



Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2025

Berdasarkan uraian sebelumnya peta strategis kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh BBRSEKP pada Tahun 2025 seperti pada Gambar dibawah ini :



Gambar 4. Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2025

Metode pengukuran capaian sasaran kegiatan tersebut dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) atau *Key Performance Indicator*, disingkat KPI pada masing - masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan, yaitupada <http://Kinerjaku.kkp.go.id> dengan pengukuran 2 strategis kegiatan sebagai berikut :

a) Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan ke satu (SK- 1) yang akan dicapai adalah **“Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”** dengan Indikator Kinerja :

1. Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) pada tahun 2025 sebanyak 1 paket.

b) Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan ke dua (SK-2) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan”** dengan Indikator Kinerja:

1. Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) pada tahun 2025 senilai 76;
2. Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2025 senilai 85;
3. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2025 senilai 92;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2025 senilai 71,50;
5. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2025 senilai 82;
6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada tahun 2025 sebesar 85%;
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) pada tahun 2025 sebesar 80%;
8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%) sebesar 80%.

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp.000) Awal	Anggaran (Rp.000) Revisi
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	76.000	12.775
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	10.650.000	8.069.146
Total Anggaran Tahun 2025		10.763.682	8.081.921

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BBRSEKP level 2 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2025 kementerian dan program BPPSDMKP. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2025 BBRSEKP telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan ditandatangani oleh Kepala BPPSDMKP Bersama dengan Kepala BBRSEKP pada tanggal 24 Januari 2025.

Seiring berjalannya kegiatan terdapat perubahan atau revisi Perjanjian Kinerja (PK) berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diantaranya:

1. Nomor B.543/BBRSEKP/TU.210/IV/2025 tertanggal 14 April 2025 tentang Penyampaian Revisi Perjanjian Kinerja BBRSEKP Tahun 2025 , perubahan tersebut hanya terkait pejabat penandatangan PK dimana semula Dr. Rita Tisiana Dwi Kuswardani menjadi Dr. Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si sebagai Kepala BBRSEKP terbaru.
2. Nota Dinas Nomor B. 228/BBRSEKP/RC.610/XII/2025 tertanggal 4 Desember 2025 tentang Penyampaian Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja BBRSEKP Tahun 2025.

Adapun indikator kinerja yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapusan Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, beserta target dan indikatornya yaitu IK “Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)” dengan target 1 laporan.
- 2) Perubahan redaksional indikator kinerja semula “Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)” menjadi “Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)” dan target semula 2 paket menjadi 1 paket berkenaan dengan adanya efisiensi anggaran yang menyebabkan terjadinya penurunan target dan penyesuaian redaksional.
- 3) Perubahan redaksional indikator kinerja semula “Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)” menjadi “Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)” berkenaan dengan penyesuaian redaksional pada BPPSDMKP.

Dengan adanya perubahan perjanjian kinerja maka indikator IK pada akhir tahun 2025 menjadi 9 (sembilan) indikator dan 2 sasaran kegiatan.

Adapun Indikator Kinerja tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2025

SEMULA				MENJADI			
SASARAN KEGIATAN	No		Target PK	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET PK
Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1
Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2	Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1	-	-	-	-
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	3	Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	76
	4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85		3	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
	5	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92		4	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92
	6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,50		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,50
	7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82		6	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85
	9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80
	10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80		9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:

Legend	
	110 - 120 (Istimewa)
	90 - 110 (Baik)
	70 - 90 (Cukup)
	50 - 70 (Kurang)
	0 - 50 (Sangat Kurang)

Metode pengukuran kinerja pada BBRSEKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran dilakukan oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BBRSEKP berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP Nomor: 15/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2025 tanggal 10 April 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Keanggotaan Tim Pengelola Kinerja terdiri dari seluruh Koordinator yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja dan staf dan tim sekretariat. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi per triwulan yang dihadiri penanggung jawab dan Tim Pengelola Kinerja. Hasil pemantauan dan pengukuran diinput kedalam aplikasi Kinerjaku untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh sekretariat BPPSDMKP.





BAB 3

Akuntabilitas

Kinerja

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2025

3.2 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

3.3 Realisasi Keuangan

3.4 Analisis Efisiensi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP Tahun 2025

Pada tahun 2025, BBRSEKP telah menetapkan 9 (Sembilan) IK, dimana realisasi sampai dengan tahun 2025 menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar **116,34% (Istimewa)** (Gambar 2). Uraian rincian dari hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan pada bagian selanjutnya bab III.



Gambar 5. Dashboard Kinerja BBRSEKP Tahun 2025 sebagaimana pada aplikasi <http://Kinerjaku.kkp.go.id>

Keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya karena faktor pengawalan monitoring dan evaluasi kegiatan pada BBRSEKP yang cukup ketat, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Terutama ketika mengalami perlambatan karena adanya perubahan transformasi struktur organisasi menjadi fungsional dan menunggu terbitnya SOTK organisasi baru belum sepenuhnya yang mana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sangat efektif mengawal agar kegiatan dapat tetap dilaksanakan. Upaya pemantauan menghasilkan beberapa upaya dan langkah antisipatif agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dengan melakukan beberapa perubahan dan metode dalam pelaksanaan kegiatan pada BBRSEKP. Kegiatan pengelolaan kinerja dituangkan dalam Surat Tugas Kepala BBRSEKP Nomor: 20/BBRSEKP /IV/2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Tahun 2025.

Monitoring dan evaluasi realisasi capaian PK online juga dilakukan melalui aplikasi yang difasilitasi oleh kementerian Kelautan dan Perikanan melalui website <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Pengisian aplikasi kinerjaku oleh BBRSEKP setelah pelaksanaan pemantauan rutin terhadap perkembangan capaian melalui kegiatan monev rencana aksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan tercapainya target IK yang tercantum di dalam PK dan target kegiatan per komponen. Metode yang

dilakukan adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulan beserta kendala yang dihadapi Pemantauan secara periodik dilakukan sebagai Langkah antisipatif dan preventif terhadap indikator yang memiliki risiko tinggi untuk dicapai atau mungkin tidak dapat mencapai target.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis kinerja juga dilakukan untuk melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja tahun 2025 dengan kinerja tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja BBRSEKP tahun 2025 menurut penetapan tiga sasaran kegiatan. Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan BBRSEKP yang disusun pada bulan Desember 2025 (revisi) saat ini memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu SK-1. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan SK-2 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta Satker memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja BBRSEKP pada tahun 2025. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Capaian Kerja BBRSEKP Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Capaian tahun 2025	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	2	120%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	76	93,80	120%
		3	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85	95,40	112,24%
		4	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92	99,35	107,99%
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,5	100	120%
		6	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82	84	102,44%
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85	85	100%
		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80	100	120%

		9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80	95	118,75%
--	--	---	---	----	----	---------

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1.

Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)

IK Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) merupakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan mengacu pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam sektor kelautan dan perikanan yang diperkenalkan dan diterapkan melalui program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya yang terlibat dalam industri kelautan dan perikanan. Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor tersebut, memperkenalkan teknik-teknik baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.

Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Model pemberdayaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan berupa Rekomendasi kebijakan model proses bisnis untuk pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat yang mencakup pengembangan kapasitas, pemanfaatan teknologi/digital, penguatan kelembagaan dan akses pendanaan yang ditanda tangani kepala BPPSDMKP.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember ditahun berjalan. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian IK Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)

Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan 2025 – 2029	Indikator BBRSEKP
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	1	2	120	-	1	120.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025		Kenaikan/Penurunan Capaian Tahun 2024-2025		Rencana Kegiatan 2025 – 2029	Indikator BBRSEKP
-	-	-	-	100	120	-	-	100	20

Capaian IK 1 Pada Tahun 2025 capaian telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 1 dan capaian 2 paket atau sama dengan 120%. Capaian sesuai dengan

laporan capaian kinerja (LCK) penanggungjawab IK Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Nomor : 3 /BBRSEKP/TU.210/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Data Dukung Capaian IK Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket). Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/4sO94cP>

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk IK ini tidak dapat dibandingkan baik dengan tahun sebelumnya maupun capaian 5 tahunan, karena IK baru terbentuk di tahun 2025 untuk mendukung IK BPPSDMKP terkait Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Dimanfaatkan Oleh Masyarakat (Paket).

Jika dibandingkan dengan Satker eselon 2 pada Kementerian lain seperti pada satker Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset Nasional sebagaimana dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 6. Perbandingan capaian IK 1 dengan satker PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – BRIN

No	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	Persentase
1	BBRSEKP – BPPSDMKP	1	2	120
2	PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – BRIN	10	12	120

Berdasarkan Tabel 6, capaian Indikator Kinerja (IK) menunjukkan kinerja yang sangat baik baik pada satuan kerja BBRSEKP–BPPSDMPKP maupun pada PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler–BRIN. Pada tahun 2025, BBRSEKP–BPPSDMPKP memiliki target sebesar 1 dan berhasil mencapai capaian sebanyak 2, sehingga tingkat pencapaiannya mencapai 120 persen dari target yang ditetapkan. Demikian pula, PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler–BRIN menetapkan target sebesar 10 dan berhasil merealisasikan capaian sebanyak 12, yang juga setara dengan 120 persen dari target. Kesamaan persentase capaian ini menunjukkan bahwa kedua satuan kerja tidak hanya mampu memenuhi target IK, tetapi juga melampauinya secara signifikan, mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut.

Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian indikator kinerja ini, antara lain:

1. Tersedianya kerangka konseptual yang jelas dalam pengembangan Model Smart Fisheries Village Plus yang menempatkan pendampingan dan penyuluhan sebagai faktor pengungkit utama (prime mover).
2. Sinergi dan kolaborasi yang efektif antar peneliti, perencana, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses penyusunan rekomendasi dan model pemberdayaan.

3. Dukungan data dan informasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang memadai sebagai dasar perumusan rekomendasi berbasis eviden.
4. Konsistensi pelaksanaan tahapan penyusunan dokumen mulai dari perencanaan, pengumpulan dan analisis data, hingga finalisasi rekomendasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5. Komitmen unit kerja dalam memastikan output IKU tidak hanya terpenuhi secara kuantitatif, tetapi juga memiliki kualitas substansi dan relevansi kebijakan.

Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Pelaksanaan assesmen, identifikasi, dan penyusunan model rancangan rekayasa sosial program kampung nelayan maju tahun 2025 oleh tim Analisis Kebijakan BBRSEKP berkontribusi dalam menghasilkan capaian IK Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) sehingga tersusun Surat Tugas dari Kepala BBRSEKP tentang Tim Penyusunan Rekomendasi Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan ST Nomor B.726/BBRSEKP/KP.440/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 (Revisi).
2. Pelaksanaan kegiatan pada calon lokasi berfokus pada rancangan Model Smart Fisheries Village Plus, dengan pendekatan “pendampingan dan penyuluhan sebagai prime mover” dalam penguatan sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan yang di laksanakan oleh BBRSEKP lalu selanjutnya data yang di peroleh disusun menjadi rancangan rekomendasi pemberdayaan masyarakat desa kelautan dan perikanan.
3. Pengumpulan bahan, dokumentasi, data dan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 serta penyusunan dokumen KAK.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan “Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan” Dengan pagu anggaran sebesar Rp12.775.000 dan tingkat penyerapan mencapai 100 persen, sedangkan capaian output melebihi target (120%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 2

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja 2.

Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)

IK Indeks profesionalitas ASN BBRSEKP merupakan indikator yang dibentuk dari

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018)
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 7. Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN

NO	DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
1	Kualifikasi	JPT	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
		Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
			DIII	25	23	21	20	10	5
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
			S2	25	20	15	10	5	1
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DI IKUTI (BOBOT)							
		PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN		PELATIHAN FUNGSIONAL		PELATIHAN TEKNIS		SEMINAR/KONFRENSI/ SARASEHAN/WORKSHOP/ LOKAKARYA/SEJENISNYA	
		SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	>= 20 JP	< 20 JP	SUDAH	BELUM
Kompetensi	JPT	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Administrator	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pengawas	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Fungsional	-	-	15	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	15	Proposional	17,5	-

Tabel 9. Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Tabel 10. Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN

DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5	
	1 Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5
	2 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		
	a. Ringan		3
	b. Sedang		2
	c. Berat		1

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara semesteran berdasarkan capaian kinerja dalam periode Semester I (1 Januari–30 Juni) dan Semester II (1 Juli–31 Desember) ditahun berjalan. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian IK Indeks profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)

IKU-2. Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan 2025 – 2029	Indikator BBRSEKP
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
86.81	83.68	87.26	89.46	76	93.8	120	4.34	76	120.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025			Kenaikan Capaian Tahun 2024-2025	Rencana Kegiatan 2025 – 2029	Indikator BBRSEKP
120	117.86	116.35	117.71	100	120		2.29	100	20

Capaian IK 2 Pada Tahun 2025 capaian telah melebihi dari target yang telah di tetapkan yaitu dengan target 76 dan capaian 93,80 atau sama dengan 120%, capaian sesuai dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 62/BPPSDM.1/KP.720/II/2026 tanggal 6 Januari 2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IPASN Tahun 2025 lingkup BPPSDMKP. Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/3NrHEJS>

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar 4,34%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan, untuk IK ini cukup fluktuatif dikarenakan adanya peningkatan maupun penurunan target yang disebabkan adanya perpindahan pegawai ke Badan Riset Nasional (BRIN) serta ke eselon I lainnya di lingkup BPPSDMKP, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 9,58%.

Jika dibandingkan dengan K/L lainnya seperti pada Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan – Kementerian Kesehatan maka capaian pada BBRSEKP lebih tinggi dibandingkan dengan Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, adapun rincian capaian perkomponen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian IK 2 dengan K/L Pusat kebijakan Upaya Kesehatan, BKPK Kemenkes

Satuan Kerja	Dimensi					Predikat
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Capaian	
BBRSEKP-BPPSDMKP	24	36,37	28,43	5	93,80	Sangat Tinggi
PKUP- BKPK, Kemenkes	22,97	30,92	25,82	5	84,72	Tinggi

Berdasarkan Tabel 12, satuan kerja BBRSEKP-BPPSDMKP mencatat capaian sebesar 93,80 yang termasuk dalam predikat Sangat Tinggi, menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang sangat optimal. Sementara itu, PKUP-BKPK Kemenkes memperoleh capaian 84,72 dengan predikat Tinggi, yang mengindikasikan kinerja yang baik meskipun masih berada di bawah capaian BBRSEKP-BPPSDMKP. Kedua satuan kerja menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas, namun BBRSEKP-BPPSDMKP unggul dalam pencapaian keseluruhan.

Keberhasilan pencapaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) pada BBRSEKP dengan capaian sebesar 93,80 persen dan predikat Sangat Tinggi didukung oleh beberapa faktor kunci yang melibatkan pengembangan kompetensi ASN secara aktif dan berkelanjutan antara lain:

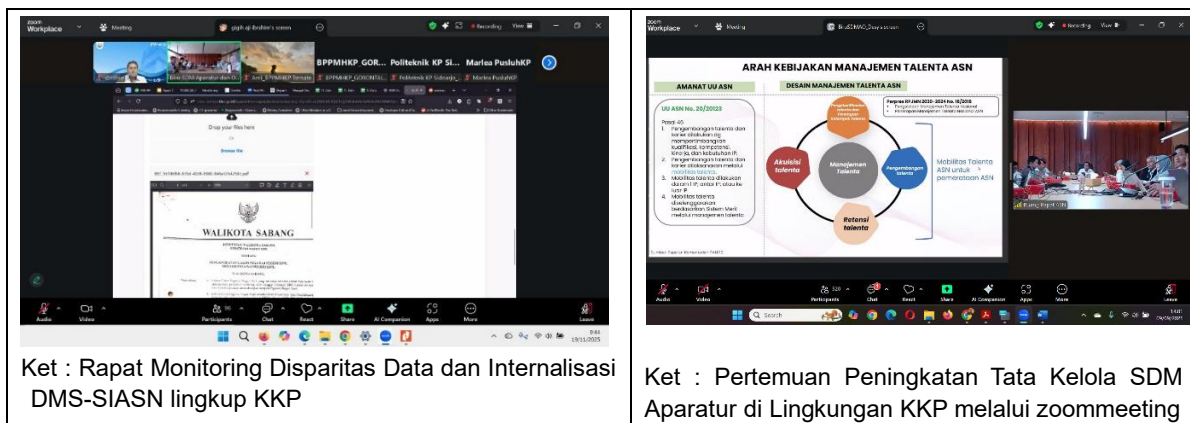
1. Keaktifan peserta dalam mengikuti pelatihan dan diklat yang diselenggarakan, termasuk berbagai pelatihan yang bersifat gratis (tidak berbayar) yang memungkinkan ASN meningkatkan kompetensi tanpa terbebani biaya;
2. Kesadaran ASN untuk secara aktif mengunggah sertifikat pelatihan ke dalam aplikasi MyASN turut memperkuat data pencapaian kompetensi, sehingga proses pemantauan dan validasi kompetensi berjalan lebih efektif dan transparan;

3. Pengelolaan kompetensi yang baik ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas kinerja ASN, sebagaimana tercermin dari capaian dimensi kinerja sebesar 28,43 atau setara dengan 94,77%;
4. Adanya keterpaduan antara pelaksanaan pelatihan yang mudah diakses dan dokumentasi kompetensi yang terintegrasi dengan aplikasi resmi (emilia) memberikan kontribusi positif pada capaian IP ASN BBRSEKP.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. Tim Kerja Kepegawaian memfasilitasi pegawai dalam pengelolaan dan pengunggahan sertifikat pelatihan ke aplikasi MyASN. Hal ini memastikan dokumentasi kompetensi dan sertifikat yang akurat dan terintegrasi, sehingga memudahkan proses pemantauan capaian individu maupun unit kerja;
2. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang baik di internal BBRSEKP. Informasi terkait pelatihan dan diklat secara rutin disampaikan melalui berbagai media komunikasi efektif, seperti apel pagi dan grup kantor yang aktif digunakan oleh seluruh pegawai.
3. Adanya koordinasi yang efektif dan sinergis dengan Sekretariat BPPSDMKP. Melalui komunikasi yang intensif dan terjadwal, sehingga dapat secara bersama-sama menyelaraskan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan pelatihan dan diklat.
4. Monitoring Rekapitulasi Keikutsertaan Kompetensi Pegawai secara berkala sebagai bahan evaluasi dan perencanaan peningkatan kapasitas SDM.
5. Monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai instrumen pengendalian kinerja individu dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi, peningkatan disiplin kerja, serta penguatan budaya kerja berbasis kinerja serta;
6. Monitoring secara berkala terhadap capaian Indeks Profesionalitas ASN sebagai bahan evaluasi peningkatan profesionalitas pegawai.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Manajemen SDM” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp6.790.000 dari pagu Rp7.000.000, sedangkan capaian output melebihi target (120%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2

Indikator Kinerja 3.

Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) merupakan kegiatan yang terdiri dari:

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- Keterbukaan informasi suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan
- Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember ditahun berjalan. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)

IKU-3. Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Kegiatan 2025 – 2029	Indikator BBRSEKP
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target
-	-	-	-	85	95.4	112.24	-	85	108.82
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025		Kenaikan Capaian Tahun 2024-2025		Rencana Kegiatan 2025 – 2029	Indikator BBRSEKP
-	-	-	-	100	112.24	-	-	100	12.24

Capaian IK 3 pada tahun 2025 ditargetkan pada angka 85 capaian IK adalah 95,40 atau sebesar 112,24%, capaian sesuai dengan memo penanggungjawab IK Nomor B. 3 /BBRSEKP/TU.210/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penyampaian Data Dukung Capaian IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai). Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/45UPotV>

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk IK ini tidak dapat dibandingkan baik dengan tahun sebelumnya maupun capaian 5 tahunan, karena IK baru terbentuk di tahun 2025 untuk mendukung kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi.

Jika dibandingkan dengan Satker Kementerian atau Lemabga lainnya seperti pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagaimana dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 14. Perbandingan Capaian IK 3 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)

Satuan Kerja	Skor	Predikat
BBRSEKP- BPPSDMKP	95,40	Informatif
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	97,96	Informatif

Berdasarkan Tabel 14, capaian Indikator Kinerja (IK) 3 terkait Penilaian Keterbukaan Informasi menunjukkan bahwa BBRSEKP–BPPSDMKP memperoleh skor sebesar 95,40 dengan predikat Informatif. Sebagai pembanding, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga memperoleh predikat Informatif dengan skor 97,96. Meskipun skor ANRI sedikit lebih tinggi, capaian BBRSEKP yang berada pada rentang nilai yang sama menunjukkan bahwa kualitas keterbukaan informasi BBRSEKP telah sejajar dengan lembaga nasional yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi dan kearsipan.

Keberhasilan pencapaian IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)

disebabkan antara lain:

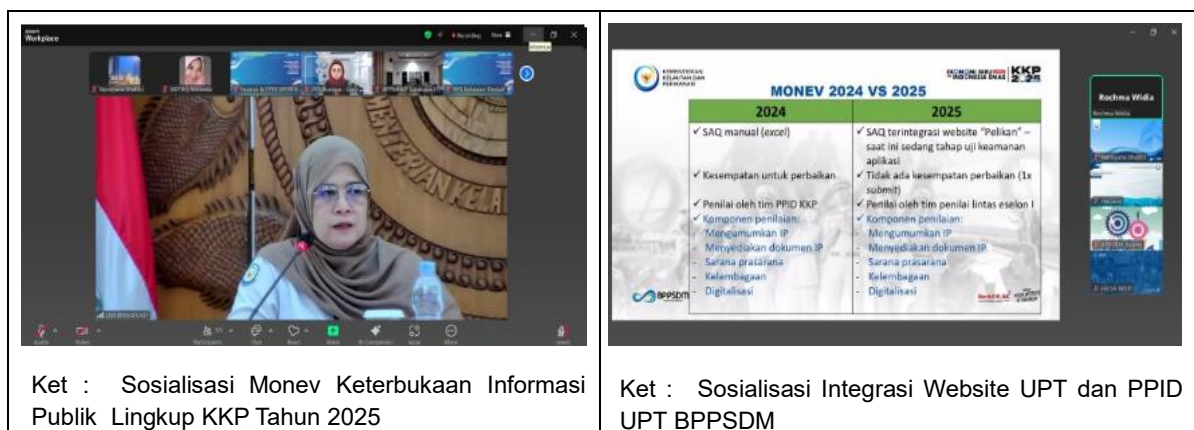
1. Terbangunnya sinergi dan kerja sama yang efektif antar bidang kerja di lingkungan BBRSEKP dalam penyediaan, pengelolaan, dan pemutakhiran informasi publik;
2. Konsistensi pelaksanaan evaluasi mandiri keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan;
3. Pemenuhan indikator penilaian keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan layanan informasi publik.

5. Penerapan digitalisasi layanan informasi publik untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi.
6. Komitmen bersama PPID dan seluruh unit kerja dalam menerapkan prinsip transparansi serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. terselesaikannya tahap evaluasi mandiri melalui pengisian kuesioner yang terintegrasi dengan website PELIKAN sebagai bagian dari tolak ukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BBRSEKP;
2. Mengumumkan IP, Menyediakan dokumen IP, Sarana Prasarana; Kelembagaan dan Digitalisasi;
3. Monitoring & evaluasi mandiri keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP 2025;
4. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim kerja internal untuk pemenuhan data.
5. Pengisian Matriks LKE SAQ sebagai instrumen evaluasi internal dalam rangka mendukung peningkatan akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui dua kegiatan Manajerial “Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi serta Layanan Data dan Informasi” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 3.305.332 (99,86%) dari pagu Rp3.310.000, sedangkan capaian output melebihi target (112,24%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3

Indikator Kinerja 4.

Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)

Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara semesteran berdasarkan capaian kinerja dalam periode Semester I (1 Januari–30 Juni) dan Semester II (1 Juli–31 Desember) ditahun berjalan. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian IK Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)

IKU-4. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Strategis BPPSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
96.85	96.83	95.89	99.29	92	99.35	107.99	0,06	92	104.57
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025		Kenaikan Capaian Tahun 2024-2025		Rencana Strategis BPPSDMKP 2025 – 2029	
108.82	108.80	102.28	105.90	100	107.99	2.09		100	7.99

Capaian Nilai IKPA BBRSEKP tahun 2025 sebesar 99,35 atau 107,99% dari target 92 Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas penyampaian IKPA dari Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro Keuangan Nomor: 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, Capaian IK juga dapat diakses melalui tautan tautan <https://bit.ly/4qtODAk>

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terjadi peningkatan capaian sebesar 0,06%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan, untuk IK ini cukup stabil sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Rencana Indikator 2025-2029 sudah melebihi dari target sebesar 7,99%. Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada indikator pengelolaan UP dan TUP.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di K/L lain, antara BBRSEKP dengan Kanwil Kemenkumham Bali, Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 16. Perbandingan Capaian IKPA dengan Kanwil Kemenkumham Bali

Nama Satker	Capaian Per Komponen Nilai IKPA			
	Target	Realisasi	Nilai Akhir	% Capaian
BBRSEKP	92	99,35	99,35	107,99
Kanwil Kemenkumham Bali	90	99,81	99,81	110,90

Berdasarkan Tabel 16 Perbandingan Capaian IKPA dengan Kanwil Kemenkumham Bali, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan, baik BBRSEKP maupun Kanwil Kemenkumham Bali sama-sama menunjukkan capaian IKPA yang optimal dan berada di atas target. Meskipun persentase capaian BBRSEKP sedikit lebih rendah dibandingkan Kanwil Kemenkumham Bali, kinerja BBRSEKP tetap dapat dinilai sangat baik karena telah melampaui target IKPA yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) diantaranya:

1. Adanya kinerja optimal pada setiap indikator penilaian IKPA. Pencapaian nilai IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. BBRSEKP mampu menyusun perencanaan anggaran yang realistis dan selaras dengan kebutuhan kegiatan, sehingga realisasi anggaran dapat berjalan tepat sasaran dan minim deviasi. Hal ini tercermin dari pelaksanaan anggaran yang konsisten dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Adanya kemampuan dalam mengelola anggaran secara optimal, ditandai dengan tingkat penyerapan anggaran yang baik serta pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu.
4. Terdapat pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga tidak terjadi penumpukan realisasi di akhir tahun anggaran.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. Input capaian output pada aplikasi omspan;
2. Penyusunan dokumen penyelesaian SPM secara tepat waktu;
3. Berkoordinasi dengan biro keuangan terkait nilai IKPA terhadap realisasi halaman III DIPA;
4. Penyelesaian tagihan sesuai dengan tidak melebihi batas yang ditentukan;
5. Pengelolaan UP dan TUP secara berkala sesuai ketentuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional unit kerja;
6. Penyelesaian tagihan kontraktual pemeliharaan sesuai prosedur dan ketentuan, untuk menjamin kelancaran pemeliharaan aset serta pengelolaan kontrak Tenaga PJLP sesuai ketentuan untuk mendukung operasional unit kerja serta;

7. Pemantauan dan penyusunan Laporan Ketersediaan Dana Detail secara rutin sebagai bentuk pengendalian dan akuntabilitas keuangan unit kerja.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Perkantoran” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 7.927.525.266 (99,02%) dari pagu Rp8.005.775.000 sedangkan capaian output melebihi target (107,99%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4

Indikator Kinerja 5.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember ditahun berjalan. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IKU-5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Startegis BPPSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	100	71.50	100	120.00	20.00	72	120.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025		Kenaikan Capaian Tahun 2024-2025		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
-	-	-	120.00	100	120	0.00		100	20.00

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) sebesar 100 dari target 71,50 atau sama dengan 120%, capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jendral Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/BBRSEKP_NKPA2025

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 untuk IK ini tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan capaian, namun jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan, untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK baru dibentuk di TW IV tahun 2024 sebagai pengganti IK Nilai Kerja Anggaran sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 466 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran, sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Rencana Indikator Kegiatan 2025-2029 capaian IK sudah melebihi target sebesar 20%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Kementerian lainnya seperti antara BBRSEKP dengan Pusat Diklat SDM KLHK, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 18. Perbandingan Capaian IK 5 dengan satker Pusat Diklat SDM KLHK

Nama Satker	Capaian Per Komponen Nilai Kinerja Anggaran			
	Target	Realisasi	%	Efisiensi SBK
BBRSEKP	71	100	120	Baik
Pusat Diklat SDM- KLHK	82,5	97,07	117,66	Baik

Berdasarkan Tabel 18 Perbandingan Capaian IK 5 dengan Satker Pusat Diklat SDM KLHK, dapat diketahui bahwa BBRSEKP dan Pusat Diklat SDM KLHK sama-sama menunjukkan

kinerja anggaran yang sangat baik. Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan target awal antara kedua satuan kerja, baik BBRSEKP maupun Pusat Diklat SDM KLHK mampu mencapai realisasi maksimal dengan tingkat efisiensi yang sama. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kedua satker memiliki kinerja anggaran yang optimal.

Keberhasilan atas pencapaian IK ini ditunjang oleh pemahaman yang cukup baik dari operator dan pengelola keuangan di BBRSEKP terhadap komponen dan indikator dari penilaian NKPA serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran. Upayan-upaya yang dilakukan dalam pencapaian antara lain:

1. Adanya keselarasan perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
2. Penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian output kegiatan;
3. pengelolaan anggaran pada BBRSEKP telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, tercermin dari kategori Efisiensi SBK yang baik.
4. Pelaksanaan anggaran dilakukan secara akuntabel, efisien, dan berkualitas. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa pengelolaan anggaran telah mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal serta dapat menjadi dasar dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran pada periode berikutnya.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. input capaian output pada aplikasi omspan yang terintegrasi dengan smart dja, penginputan capaian output secara tepat waktu;
2. Berkoordinasi dengan biro keuangan terkait nilai penilaian efisiensi;
3. Mengikuti rekonsiliasi aplikasi lingkup BPPSDMKP serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di BBRSEKP;
4. Dilakukan monitoring dan penyusunan Laporan Efisiensi SBK sebagai bentuk pengendalian penggunaan anggaran kegiatan serta
5. Dilakukan monitoring dan penyusunan Laporan Perencanaan Anggaran sebagai bentuk pengendalian kesesuaian rencana dengan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Perencanaan dan Penganggaran” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp2.212.000 (99,91%) dari pagu Rp 2.214.000 sedangkan capaian output melebihi target (120%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5

Indikator Kinerja 6.

Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) merupakan penilaian Nilai PM SAKIP Unit Eselon II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon II di lingkungan KKP.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember ditahun berjalan. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 19. Capaian IK Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)

IKU-6. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	83	83.65	82.00	84	102.44	0,42	82	102.44
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025		Kenaikan Capaian Tahun 2024-2025		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
-	-	103.11	103.27	100	120	16.73		100	20.00

Capaian Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) senilai 84 dari target 82 atau sama dengan 102,44%, capaian IK berdasarkan surat Sekretaris BPPSDMKP Nomor B.4485/BPPSDM.1/RC.510/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level 2 BPPSDM, capaian IK juga dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/DadukPMSAKIP_BBRSEKP2025.

Indikator ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu terdapat peningkatan capaian sebesar 0,42% namun, untuk dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan IK ini tidak dapat dibandingkan, karena IK ini baru dibentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan pada BBRSEKP Penyusunan Pelaporan Kinerja Satker pada BBRSEKP di tahun 2023, meskipun pada kenyataannya penilaian SAKIP tetap dilakukan di tahun-tahun sebelumnya namun IK tersebut hanya berhenti di level I, sedangkan jika dibandingkan terhadap target jangka menengah untuk IK ini sudah melebihi target sebesar 20%.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis di Kementerian Lainnya, antara BBRSEKP dengan Pusat Diklat SDM- KLHK, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 20. Perbandingan Capaian IK 6 dengan satker Pusat Diklat SDM KLHK

No	Satuan Kerja	Target 2025	Capaian 2025	Predikat	Persentase
1	BBRSEKP – BPPSDMKP	82	84	A	102,44
2	Pusat Diklat SDM- KLHK	72	87,83	A	120

Berdasarkan hasil perbandingan (benchmarking) pada tabel 20 diatas, capaian BBRSEKP menunjukkan hasil yang sangat baik. Dengan target yang ditetapkan sebesar 82, realisasi capaian mencapai 84 atau setara dengan 102,44% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja BBRSEKP telah melampaui target yang direncanakan. Secara keseluruhan, baik BBRSEKP maupun Pusat Diklat SDM–KLHK menunjukkan kinerja yang optimal karena capaian yang diperoleh berada di atas target yang telah ditetapkan.

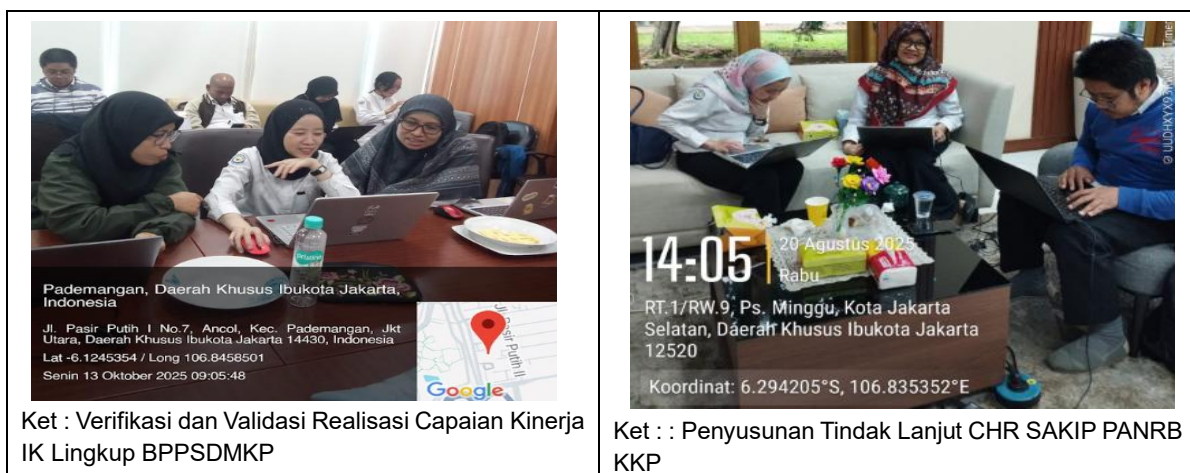
Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain:

1. Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja telah disusun secara selaras dan konsisten, indikator kinerja terukur dengan jelas dan relevan, serta capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal. Selain itu, tindak lanjut atas hasil evaluasi juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.
2. Adanya komitmen BBRSEKP dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan pengelolaan kinerja yang efektif, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.
3. Kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan sasaran indikator kegiatan, , serta pengukuran dan pelaporan kinerja yang akurat dan tepat waktu. Evaluasi kinerja internal telah dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga capaian kinerja dapat diwujudkan secara efektif dan efisien.
4. Pencapaian nilai SAKIP kategori A ini menjadi bukti komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain:

1. Penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan kinerja seperti, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja.
2. Dilakukan pengukuran dan monitoring capaian kinerja secara berkala untuk memastikan ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.
3. Pengisian matriks LKE sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kinerja dalam mendukung implementasi SAKIP, serta untuk mendorong penyempurnaan indikator, ketepatan target, serta konsistensi antara program dan hasil yang dicapai, sehingga mendukung optimalisasi capaian IK dan peningkatan nilai SAKIP secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan dokumen tindak lanjut CHR SAKIP sebagai langkah strategis dalam memastikan rekomendasi hasil revidi ditindaklanjuti secara konkret. Proses ini mendukung perbaikan sistem manajemen kinerja dan peningkatan kualitas capaian IK secara berkelanjutan.
5. Penyusunan Laporan PM SAKIP sebagai instrumen pemantauan berkala atas implementasi sistem manajemen kinerja, serta untuk mendukung pengendalian pencapaian IK melalui identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan.
6. Dilakukan Verifikasi dan validasi capaian IKU sebagai pengendalian mutu data kinerja guna memastikan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan realisasi yang dilaporkan, serta untuk mendukung penyajian informasi kinerja yang kredibel dan akuntabel.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Pemantauan dan Evaluasi” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp2.460.000 (99,03%) dari pagu Rp2.484.000 sedangkan capaian output melebihi target (102,44%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6

Indikator Kinerja 7

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon II lingkup BPPSDMKP. Bagi Satker yang tidak diuji petik Pengawasan oleh Itjen, maka nilai capaian Satker yang diperoleh maksimal sebesar 85 (sesuai target) dengan persentase capaian sebesar 100%.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara triwulan berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode triwulan dalam tahun berjalan, yaitu Triwulan I (Januari–Maret), Triwulan II (April–Juni), Triwulan III (Juli–September), dan Triwulan IV (Oktober–Desember). Hasil pengukuran triwulanan tersebut menjadi dasar evaluasi dan pengendalian pencapaian target kinerja hingga akhir tahun. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 21. Capaian IK 7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IKU-7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
100	100	80	82	85.00	85	100.00	21.95	85	100.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025			Kenaikan Capaian Tahun 2024-2025	Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
120	120	100	100.00	100	100		0.00	100	0.00

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, dengan target 85 dan capaian 85 atau sama dengan 100%. Capaian sesuai dengan surat dari Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Nomor: B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2026 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2025. bukti dukung capaian IK juga dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/3YNa4jW>

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terjadi kenaikan capaian sebesar 21,95%, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini cukup stabil, jika dibandingkan dengan target Rencana Kerja tahun 2025-2029 capaian sudah mencapai target sebesar 100%.

Gambar 12. Data Rekapitulasi Capaian IK 7 sesuai Nota Dinas BPPSDMKP : Nomor: B.94/BPPSDM.1/RC.610/I/2026 tanggal 9 Januari 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPPSDM
Triwulan IV Tahun 2025

No	Satker Pusat	Temuan Awal (Saran)	Tindak Lanjut (Saran)	%
1	Sekretariat BRSDM	80	57	71,25
2	Pusat Pendidikan KP	26	24	92,31
3	Pusat Pelatihan	4	4	100,00
4	Pusat Penyuluhan (Pusriskel)	25	25	100
5	BBRP2BKP	0	0	0
6	BBRSEKP	0	0	0

Sumber Data: Surat BPPSDMKP

Jika dibandingkan dengan satker K/L sejenis seperti Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 22. Perbandingan Capaian IK 7 K/L BBRSEKP Dengan Balitbangdiklat, Kementerian Agama

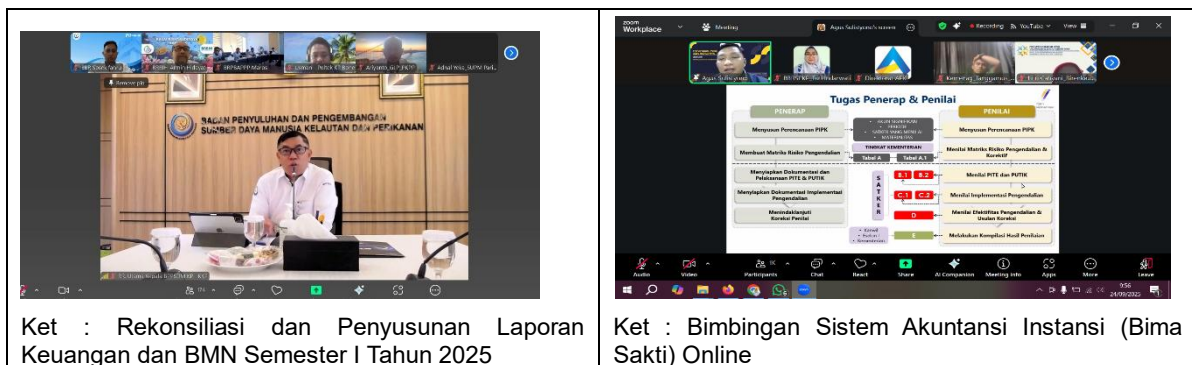
Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP- BPPSDMKP	85	85	100
Balitbangdiklat- Kementerian Agama	80	100	120%

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain tidak ditemukannya hasil temuan pada BBRSEKP.

Kegiatan pendukung IK ini antara lain koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP, Biro Keuangan KKP dan Koordinator Keuangan di BPPSDMKP, adanya rapat dan pengawasan internal di BBRSEKP serta Penyusunan Dokumen SPIP sebagai upaya penguatan sistem pengendalian internal guna memitigasi risiko pencapaian kinerja dan memastikan program/kegiatan berjalan efektif serta sesuai target IK yang telah ditetapkan.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Manajemen Keuangan” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp5.468.500 (97,93%) dari pagu Rp5.584.000 sedangkan capaian output sesuai target (100%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat

dikategorikan efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7

Indikator Kinerja 8

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)

IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) merupakan:

- Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.
- Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1)
- Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara triwulan berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode triwulan dalam tahun berjalan, yaitu Triwulan I (Januari–Maret), Triwulan II (April–Juni), Triwulan III (Juli–September), dan Triwulan IV (Oktober–Desember). Hasil pengukuran triwulanan tersebut menjadi dasar evaluasi dan pengendalian pencapaian target kinerja hingga akhir tahun. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 23. Capaian IK 8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)

IKU-8. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Strategis BPPSDMKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	-	-	80.00	100	120.00	-	80	120.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025		Kenaikan Capaian Tahun 2024-2025		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
-	-	-	-	100	120	-	-	100	20.00

Capaian IK pada tahun 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan lebih dimana dengan target 80 dan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%, Capaian sesuai dengan nota dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Nomor 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, data dukung capaian dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/4a27AEy>

Indikator ini, tidak dapat dibandingkan baik dengan tahun sebelumnya maupun 5 tahunan karena merupakan IK baru yang dibentuk di tahun 2025.

Jika dibandingkan dengan satker K/L sejenis seperti Balai Besar Pengolahan Produk Dan Bioteknologi (BBP2BKP) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 24. Perbandingan Capaian IK 8 K/L BBRSEKP Dengan BBP2BKP

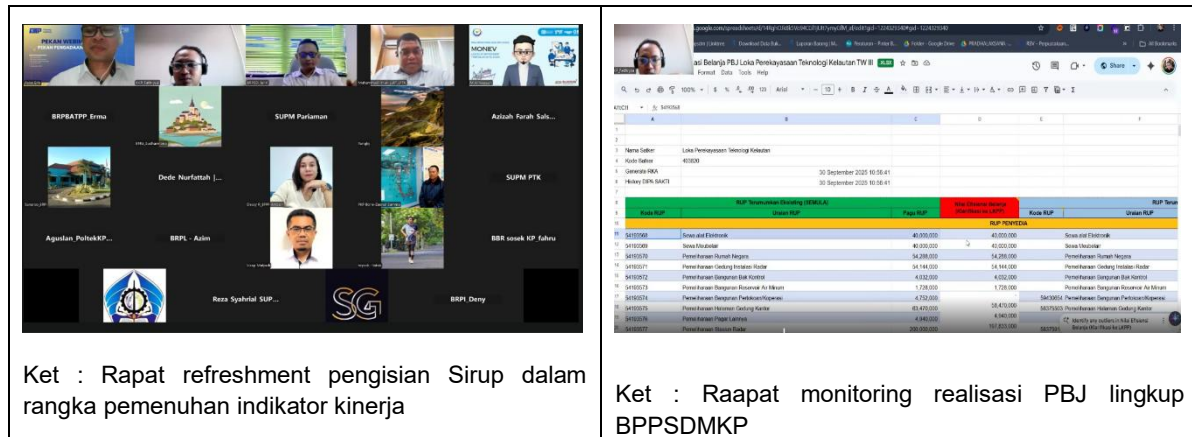
Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP- BPPSDMKP	80	100	120
BBP2BKP- BPPSDMKP	80	100	120

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain terselesaikannya identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang telah disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta tersusunnya revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain adanya koordinasi dengan Set. BPPSDMKP, adanya rapat dan koordinasi dengan tim sekretariat BPPSDMKP serta Penyusunan Dokumen Pengadaan Keperluan Perkantoran sebagai langkah perencanaan

administratif untuk menjamin ketersediaan sarana pendukung kerja, sehingga pelaksanaan program dan pencapaian IK dapat berjalan efektif dan efisien.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Umum” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp 40.211.718 (99,58%) dari pagu Rp40.381.000 sedangkan capaian output melebihi target (120%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8

Indikator Kinerja 9.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)

IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%) merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember ditahun berjalan. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 25. Capaian IK 9 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)

IKU-9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)									
Realisasi Capaian				2025				Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	% Penurunan Tahun 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
-	-	100	100	80.00	95	113.75	5.00	80	113.75
Persentase Capaian				Persentase Capaian Tahun 2025		Penurunan Capaian Tahun 2024-2025		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
-	-	120	120	100	120	6.25		100	20.00

Capaian IK pada tahun 2025 sudah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan lebih dimana dengan target 80 dan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%, Capaian sesuai Nota Dinas Plt. Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor: 4214/BPPSDM.1/PL.760/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 tentang Capaian IKU “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPSDMKP Tahun 2025”, capaian IK juga dapat diakses melalui tautan tautan <https://bit.ly/3NruD2Q>

Indikator ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka capaian IK terjadi penurunan capaian sebesar 5% hal ini disebabkan tidak optimalnya Pemanfaatan RKBMN Satker dalam penyusunan RKAKL (sumber acuan RKAKL yang digunakan adalah RKAKL revisi pasca efisiensi) , untuk IK ini tidak dapat dibandingkan dengan kinerja kinerja 5 tahunan karena IK ini baru dibentuk di tahun 2023 untuk mengakomodir kegiatan untuk pada BBRSEKP terkait Pemeliharaan kantor dan Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor pada BBRSEKP.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 5% hal ini diakibatkan pada BBRSEKP menggunakan sumber RKAKL awal sehingga data yang disajikan kurang dari 50%, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini tidak dapat dibandingkan karena IK baru berdiri pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan target Rencana Kerja tahun 2025-2029 capaian sudah melebihi dari target sebesar 20%.

Jika dibandingkan dengan satker K/L sejenis seperti Balai Besar Pengolahan Produk Dan Bioteknologi (BBP2BKP) sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 26. Perbandingan Capaian IK 9 K/L BBRSEKP Dengan BBP2BKP

Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP- BPPSDMKP	80	95	113,75
BBP2BKP- BPPSDMKP	80	97,5	120

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) BBRSEKP
2. Penyelesaian Pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN BBRSEKP TA. 2025
3. Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian BMN
4. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T-2 secara tepat waktu

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara penyusunan laporan terkait BMN, Rapat internal terkait pengelolaan BMN di BBRSEKP, berkoordinasi dengan Set. BRSDMKP terkait dengan penghapusan BMN serta dilakukan Monitoring BMN sebagai pengendalian dan penatausahaan aset untuk memastikan tertib administrasi, keakuratan data, serta optimalisasi pemanfaatan barang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian IK.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui dua kegiatan Manajerial “Layanan BMN dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp2.398.000 (100%) dari pagu Rp2,398.000 sedangkan capaian output melebihi target (113,75%). Dengan demikian, kegiatan ini dapat dikategorikan sangat efisien, menunjukkan pemanfaatan anggaran yang optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.



Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9

3.3 Realisasi Keuangan BBRSEKP Tahun 2025

Penyerapan Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Keluatan dan Perikanan secara umum berhasil mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan baik. Anggaran BBRSEKP pada tahun 2025 disusun berdasarkan variable jenis pengeluaran dan variable kegiatan. Variabel pengeluaran yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan variable kegiatan adalah kegiatan dukungan manajemen.

Pagu anggaran BBRSEKP dalam DIPA TA. 2025 adalah Rp 8.081.921.000 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp6.715.106.000 dan Belanja Barang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.354.040.000 dengan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp7.813.037.458 atau sama dengan 96,67%.

Tabel 27. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2025

JENIS BELAJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	Rp6.715.106.000	Rp6.597.557.801	98,25%
Belanja Barang	Rp1.354.040.000	Rp1.215.479.657	89,77%
TOTAL	Rp8.081.921.000	Rp7.813.037.458	96,67%

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 28. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp.000)	REALISASI (Rp.000)	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12.775.000	12.775.000	100%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	8.069.146.000	7.990.370.816	99,02%

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 29. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	12.775.000	12.775.000	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	7.000.000	6.790.000	97
		3 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	3.310.000	3.305.000	99,86
		4 Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	8.005.775.000	7.927.525.266	99,02
		5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	2.214.000	2.212.000	99,91

		6	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	2.484.000	2.460.000	99,03
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	5.584.000	5.468.000	97,93
		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	40.381.000	40.211.718	99,58
		9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	2.398.000	2.398.000	100
Total Realisasi Anggaran Tahun 2025				8.081.921.000	8.003.145.816	99,03 %

Sumber : Aplikasi Omspan

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP

A. Efisiensi Anggaran

BBRSEKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Diktum 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran mengamanatkan pelaksanaan assessment RO, yaitu: *“Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi pra-pelaporan”*

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran.

Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Secara efisiensi, sampai dengan akhir tahun telah tergambar capaian atas efisiensi pada BBRSEKP dimana perhitungan dibandingkan dengan capaian IK maka anggaran di BBRSEKP sangat efisiensi.

Secara ringkas dapat disimpulkan sebagaimana pada tabel 42 berikut, efisiensi anggaran BBRSEKP memperoleh skor 17,31%. Efisiensi menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan -20. Kondisi ini dipengaruhi atas penggunaan anggaran dengan realisasi anggaran sebesar Rp8.003.145.816 (99,03%) dari total pagu Rp8.081.921.000 dengan capaian tingkat output kegiatan sebesar 116,34% sebagaimana rumus perhitungan berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023.

Tabel 30. Capaian Efisiensi Anggaran BBRSEKP Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target IK	Capaian IK	% Capaian	Kegiatan Pendukung RKAKL	% RVRO	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Efisiensi
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	2	120	Inovasi yang diterapkan untuk Penyuluhan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (DL.7020.ABW.126)	100	12.775.000	12.775.000	100	20
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan									
	2 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	76	93,80	120	Layanan Manajemen SDM Internal (WA.2378.EBC.954)	100	7.000.000	6.790.000	97	23
	3 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85	95,40	112,24	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (WA.2378.EBA.958)	100	3.310.000	3.305.000	99,86	12,38
	4 Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92	99,35	107,99	Layanan Perkantoran (WA.2378.EBA.994)	100	8.005.775.000	7.927.525.266	99,02	8,97
	5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,50	100	120	Layanan Perencanaan dan Penganggaran (WA.2378.EBD.952)	100	2.214.000	2.212.000	99,91	20,09
	6 Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82	84	102,44	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (WA.2378.EBD.953)	100	2.484.000	2.460.000	99,03	3,41
	7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85	85	100	Layanan Manajemen Keuangan (WA.2378.EBD.955)	100	5.584.000	5.468.000	97,93	2,07
	8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80	100	120	Layanan Umum (WA.2378.EBA.962)	100	40.381.000	40.211.718	99,58	20,42
	9 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80	95	118,75	Layanan BMN (WA.2378.EBA.956)	100	2.398.000	2.398.000	100	18,75
Total Anggaran dan Efisiensi BBRSEKP Tahun 2025				116,34		100	8.003.145.816		99,03	17,31





BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing – masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP di tingkat satker pada tahun 2025 sebesar **116,34%**, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 18 . Capaian Kinerja pada *Dasboard* Kinerjaku BBRSEKP Tahun 2025



Selama tahun 2025 dari 9 IK BBRSEKP, terdapat 6 IK berstatus istimewa (biru), dan terdapat 3 IK berstatus baik (hijau). Rincian target dan realisasi 9 IK tersebut adalah:

1. Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) dengan target sebesar 1 paket dan capaian sebesar 2 paket atau sama dengan 120%;
2. Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) dengan target indeks sebesar 76 dan capaian sebesar 93,80 atau sama dengan 120%;

3. Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) dengan target nilai sebesar 85 dan capaian sebesar 95,40 atau sama dengan 112,24%;
4. Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai) dengan target nilai sebesar 92 dan capaian sebesar 99,35 atau sama dengan 107,99%;
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) dengan target nilai sebesar 71,5 dan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%;
6. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) dengan target nilai sebesar 82 dan capaian sebesar 84 atau sama dengan 102,44%;
7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 85% dan capaian sebesar 85% atau sama dengan 100%;
8. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%) dengan target sebesar 80% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;
9. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%) dengan target sebesar 80% dan capaian sebesar 95% atau sama dengan 118,75%.

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja tahun 2025, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 31. Rincian Target Dan Realisasi Atas 9 IK Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Tahun 2025	Capaian tahun 2025	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1	2	120%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	76	93,80	120%
		3	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85	95,40	112,24%
		4	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92	99,35	107,99%
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,5	100	120%
		6	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82	84	102,44%
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85	85	100%
		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80	100	120%
		9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80	95	118,75%

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah istimewa. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja tahun 2025, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama tahun 2025 sebesar Rp8.003.145.816 relatif rendah dari pagu anggaran Rp8.081.921.000. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 99,03% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari dua SK tercapai melebihi target atau **"ISTIMEWA"**, yaitu dengan rincian SK "Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan" dengan persentase capaian 120,00% sedangkan SK "Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan" dengan persentase capaian 112,68%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

2. Penyesuaian Dokumen Kinerja Tahun Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2026 terdapat peningkatan alokasi anggaran sebagaimana tercantum dalam DIPA dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan alokasi anggaran tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.

Oleh karena itu, dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya. Penyesuaian ini dilakukan sebagai upaya optimalisasi hasil evaluasi kinerja agar target yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan menantang, serta selaras dengan alokasi anggaran dalam DIPA terbaru.

2. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik, kegiatan pemantauan atas capaian IK secara berkala perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan rincian target IK yang disusun serta untuk melihat

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK melalui evaluasi rencana aksi secara berkala.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari triwulan tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. Rita Tisiana Dwi K**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan


I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan


A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2	Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	3	Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76
		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
		5	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,5
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	113.682.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.650.000.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		10.763.682.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan



A. Rita Tisiana Dwi Kuswardani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Novi Susetyo Adi**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 April 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Novi Susetyo Adi

Lembar Pengesahan	
Sekretaris BPPSDMKP	
Katimja BBRSEKP	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	2
2	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2	Hasil Pemantauan Sosial Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan di Lokasi Program Prioritas KKP (Laporan)	1
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	3	Indeks Profesional ASN BBRSEKP (Indeks)	76
		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
		5	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,5
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85
		9	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BBRSEKP (%)	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	113.682.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	10.650.000.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		10.763.682.000

Jakarta, 17 April 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan



Novi Susetyo Adi

Lembar Pengesahan

Sekretaris BPPSDMKP	
Katimja BBRSEKP	



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novi Susetyo Adi
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : I Nyoman Radiarta
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Novi Susetyo Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1.	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket)	1
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2.	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	76
		3.	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
		4.	Nilai IKPA BBRSEKP (Nilai)	92
		5.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,5
		6.	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	85
		8.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	80
		9.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BBRSEKP (%)	80

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12.775.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.069.146.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		8.081.921.000

Jakarta, 4 Desember 2025

PIHAK KEDUA

Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Novi Susetyo Adi



PENGHARGAAN









Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
2025